

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA-SKPD)
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Ijin-Nya penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Renja-SKPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2024 merupakan dokumen rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang merupakan dasar dalam rangka persiapan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2024 memuat isu-isu strategis yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan di Kota Banjarbaru selama Tahun 2024.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2024 menyajikan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi, Misi, Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2024.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2024 ini disusun berdasarkan pemikiran yang komprehensif dan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah, sedang dan akan dijalankan, sehingga Renja ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru untuk melaksanakan program kerja selama Tahun Anggaran 2024.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2024.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya dalam rangka mewujudkan *Good Governance* serta penyusunan kebijaksanaan, program dan kegiatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan Kota Banjarbaru dimasa yang akan datang.

Banjarbaru, Juni 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Perikanan Kota Banjarbaru,



ABU YAJID BUSTAMI, S.Sos, M.AP

Pembina Tk. I

NIP. 19660711 198703 1 005

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1	
1.2. Dasar Hukum	3	
1.3. Maksud dan Tujuan	5	
1.4. Sistematika Penulisan.....	6	
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas	8	
2.2. Analisis Kinerja Perjalanan Dinas	40	
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	43	
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	50	
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	52	
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	54	
BAB IV	PENUTUP	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat dokumen rencana pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA-SKPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD.

Dengan demikian RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP).

Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan

Kinerja SKPD.

Penyusunan RENJA Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2024 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi diformulasikan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan yang memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan pasal 2 (dua) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lainnya.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang Rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Banjarbaru.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru sebagai salah satu SKPD di Kota Banjarbaru memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Visi Misi Kota Banjarbaru Tahun 2021 – 2026.

Tahun 2024 adalah tahun ke empat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru 2021-2026, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 yang memuat

rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja SKPD adalah ;

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Satuan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman

Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

18. Peraturan Kementerian Dalam egeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3) ;
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 11);
21. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 7).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2024 selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru;
- b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru;

- c) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru;

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;
- b) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada tahun anggaran;
- c) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang dan Unit Pelayanan Tehnis (UPT) pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut ;

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II.HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat tentang hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas, Program dan Kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan rencana tindaklanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang perubahan Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan dengan mengukur realisasi capaian-capaian target perencanaan yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis. Evaluasi terhadap Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan rencana program/kegiatan dan hasil rencana program/kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru tahun 2024 juga dipengaruhi oleh dilaksanakannya Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.

Terdapat 10 (sepuluh) program, terdiri 3 (tiga) program urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan 7 (tujuh) program Urusan Pemerintahan Pilihan, dengan total kegiatan 23 (dua puluh tiga) dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dalam rangka mewujudkan visi misi pemerintah kota Banjarbaru, dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah Pada SKPD

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Sub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal

Sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun

Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

UPT PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Sub Kegiatan Penyediaan prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

Sub kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang

Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil perkebunan

Sub Kegiatan Pengawasan penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura

Kegiatan penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

Sub kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten /Kota Lain

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian

Sub kegiatan Pengendalian dan pemanfaatan Kawasan Pertanian

Sub Kegiatan pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular

Sub kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Analisis Risiko Penyakit Hewan, Zoonosis, Produk Hewan dan Media pembawa Penyakit Hewan Lainnya

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Sub kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Sub Kegiatan Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani

UPT BALAI PEMBIBITAN TERNAK DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Kegiatan Peningkatan Mutu dan peredaran benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam daerah kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik veteriner

URUSAN PEMERINTAHAN PANGAN

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Merupakan program penunjang urusan semua SKPD

Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat

Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mengantisipasi krisis pangan global, penyediaan pangan lokal sumber karbohidrat non beras, menggerakkan ekonomi masyarakat serta mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, aktif dan produktif melalui kecukupan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, dan salah satu upaya untuk mendorong masyarakat agar memvariasikan makanan pokok yang dikonsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis saja.

Dalam rangka pelaksanaan program sasaran strategis yang di gunakan adalah peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat dengan indikator kinerja Skor pola pangan harapan konsumsi, dimana target Tahun 2023 adalah 90,25 dan realisasi 91,70 atau dengan capaian 101,61 %.

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program tersebut adalah :

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Sub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan pangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal

Sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun

Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

B. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Program Pengawasan Keamanan Pangan bertujuan agar pemerintah dapat memberikan perlindungan kepada rakyat untuk mengkonsumsi pangan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan jiwanya, dimana pengawasan ini yang bersumber dari tanaman segar asal tumbuhan

Dalam rangka pelaksanaan program tersebut, sasaran yang digunakan adalah peningkatan pengawasan Keamanan pangan dengan indikator kinerja Persentase PSAT (Pangan Segar asal Tumbuhan) yang aman, dimana Tahun 2023 di targetkan sebesar 70 % dan terealisasi 91,44 % atau dengan capaian 130,63 %.

Dalam rangka mendukung program tersebut, maka dilaksanakan beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Program pengelolaan perikanan budidaya ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan serta pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran meningkatnya jumlah pelaku usaha perikanan terampil, dan tenaga penyuluh perikanan pada sentra perikanan.

Sasaran strategis yang digunakan adalah peningkatan pengelolaan perikanan budidaya dengan indikator Jumlah produksi perikanan budidaya dengan target 399,55 ton dan terealisasi sebesar 449,95 ton atau dengan capaian 112,61 %.

Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut di atas adalah :

Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

B. PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Merupakan salah satu program dan kegiatan prioritas kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka mendukung terwujudnya kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sasaran yang digunakan adalah Peningkatan Sumberdaya Perikanan dengan indikator kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dengan target Tahun 2022 sebesar 35,05 ton dan realisasi 101,2 ton atau dengan capaian 288,70 %.

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program tersebut diatas adalah :

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

C. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi olahan perikanan juga untuk meningkatkan keterampilan anggota kelompok masyarakat atau kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, selain itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian keluarga.

Sasaran yang digunakan adalah peningkatan produksi olahan hasil perikanan dengan indikator kinerja persentase pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan, dimana pada tahun 2022 dengan target 2 % dan realisasi sebesar 2,1% atau dengan capaian 105 %.

Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program tersebut adalah sebagai berikut :

Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN

A. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan produksi melalui upaya meningkatkan luas tanam dan indeks pertanaman (IP) pertanian termasuk meningkatkan populasi ternak, karena program ini juga menaungi program dan kegiatan bidang peternakan.

Sasaran strategis yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program

tersebut ada 2 (dua) yaitu :

1. Meningkatnya pengembangan sarana pertanian/peternakan dengan indikator kinerja Jumlah produksi tanaman pangan, dimana target tahun 2022 adalah 6.943,81 ton dan realisasi 4.525,98 ton atau dengan capaian 65,1 %
2. Meningkatnya populasi ternak dengan indikator kinerja Jumlah Populasi ternak, dimana target Tahun 2022 adalah sebesar 2.851.000 ekor dan realisasi 2.854.153 ekor atau dengan capaian 101 %.

Dalam rangka mendukung program tersebut, maka dilaksanakan beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Sub kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang
Sub Kegiatan pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil perkebunan
Sub Kegiatan Pengawasan penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura

Kegiatan penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

Sub kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten /Kota Lain

Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

Kegiatan penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

Sub kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten /Kota Lain

B. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Merupakan program penunjang utama dan pendukung dalam urusan pertanian khususnya dalam melaksanakan budidaya pertanian. Sasaran yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program tersebut adalah Peningkatan penyediaan prasarana pertanian dengan indikator kinerja Persentase prasarana pertanian yang di aplikasikan. Pada Tahun 2023 di targetkan 100% dan realisasi 100 % .

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian program tersebut adalah :

Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian

Sub kegiatan Pengendalian dan pemanfaatan Kawasan Pertanian
Sub Kegiatan pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B,
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian
Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota

C. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Program ini bertujuan untuk mengendalikan dan penanggulangan penyakit yang menyerang ternak, baik yang zoonosis maupun yang menular ke ternak lain. Penyakit zoonosis itu penyakit yang menyerang hewan dan menularkan ke manusia contohnya flu burung dan Rabies.

Penyakit yang menular dari hewan/ternak yaitu PMK (Penyakit Mulut dan Kuku), Brucellosis, Jembrana dan lain lain. Untuk mencegahnya dilakukan vaksinasi (Rabies, PMK dan lain lain). Selain vaksinasi dilakukan desinfeksi kandang dengan Desinfektan. Apabila sudah tertular penyakit, ternak di obati dan dilakukan sosialisasi ke masyarakat.

Sasaran yang digunakan adalah peningkatan status kesehatan hewan di Kota Banjarbaru, dengan indikator kinerja jumlah Hewan yang tertangani dengan target Tahun 2023 sebesar 250 ekor dan realisasi sebesar 450 ekor atau dengan capaian 180 %.

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program tersebut adalah sebagai berikut:

Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

Sub kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan

D. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Merupakan program yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan sumberdaya penyuluh dan petani yang merupakan salah satu ujung tombak agar produktivitas pangan, pertanian dan perikanan meningkat demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, pangan dan perikanan.

Sasaran strategis yang digunakan dalam program ini adalah Meningkatnya Kelembagaan Penyuluh dan Petani dengan Indikator Kinerja Persentase Jumlah Poktan Yang Naik Kelas/Score, dimana pada Tahun 2023 di targetkan sebesar 67 % dan realisasi sebesar 68,13 % atau dengan capaian sebesar 101,68%.

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam pencapaian program tersebut adalah sebagai berikut :

Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Sub kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Sub Kegiatan Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani

Tabel 2.1.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kota Banjarbaru

Kegiatan Tahun 2022 Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)		
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Target Realisasi (%)	Target Renja SKPD	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
	Usuran Semua SKPD									
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	B		B			B		
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%		100%			100%		

01.	2.	01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	5		5		5		
					Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender	100%		100%		100%		
01.	2.	01.	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		
01.	2.	01.	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		
01.	2.	02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan	100%		100%		100%		
01.	2.	02.	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 orang		98 orang		98 orang		
01.	2.	02.	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan		2 laporan		2 laporan		
01.	2.	02.	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 laporan		1 laporan		1 laporan		

				Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD							
01.	2.	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengimplementasik an hasil bimtek dan diklatnya	100%		100%			100%	
01.	2.	05.	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 peserta		5 peserta			5 peserta	
01.	2.	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	1 tahun		1 tahun			1 tahun	
01.	2.	06.	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	2 paket		2 paket			2 paket	
01.	2.	06.	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	6 paket		6 paket			6 paket	
01.	2.	06.	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia	32.000 lembar		32.000 lembar			32.000 lembar	
					Jumlah barang cetakan yang tersedia	70 eks		70 eks			70 eks	
01.	2.	06.	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah bahan bacaan atau buku peraturan	450 eks		450 eks			450 eks	

				Perundang-undangan yang tersedia								
01.	2.	06.	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	100 laporan		100 laporan			100 laporan	
01.	2.	07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan	100%		100%			100%	
01.	2.	07.	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel (meja kerja, set meja dan kursi tamu,dst) yang dibeli	17 buah		17 buah			17 buah	
01	2.	07.	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya (perontok padi) yang dibeli	8 buah		8 buah			8 buah	
01.	2.	07.	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya (lahan pakir,pagar) yang terbangun	3 paket		3 paket			3 paket	
01.	2.	08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah yang difasilitasi	100%		100%			100%	
01.	2.	08.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainnya yang	4 macam		4 macam			4 macam	

					dapat digunakan								
01.	2.	08.	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai administrasi kantor non ASN aktif	4 orang		4 orang			4 orang		
01.	2.	09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	100%		100%			100%		
01.	2.	09.	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	1 unit		1 unit			1 unit		
501.	2.	09.	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	65 unit		65 unit			65 unit		
01.	2.	09.	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit		50 unit			50 unit		
01.	2.	09.	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	4 paket		4 paket			4 paket		

01.	2.	09.	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara	15 paket		15 paket			15 paket		
				URUSAN KETAHANAN PANGAN									
03.				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	90,25		90,1			90,2		
03.	2.	01.		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase cakupan pangan yang tersalurkan	70%		65%			70%		
03.	2.	01.	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Informasi neraca bahan makanan yang tersedia	12 kali		12 kali			12 kali		
03.	2.	01.	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah beras yang disediakan	4 ton		4 ton			4 ton		
03.	2.	01.	04	Pemantauan Stok,	Jumlah laporan hasil	12 kali		12 kali			12 kali		

				Pasokan dan Harga Pangan	pemantauan pasokan dan harga bahan pokok di Kota Banjarbaru							
03.	2.	02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan pangan untuk keseimbangan cadangan pangan daerah (%)	0,033		0,032			0,032	
03.	2.	02		Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah rencana kebutuhan pangan lokal yang tersusun	1 dokumen		1 dokumen			1 dokumen	
03.	2.	02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah yang tersedia	23 ton		22 ton			22 ton	

03.	2.	04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Konsumsi Pangan	1.788		1.786,5			1.786,5		
					Persentase kelompok binaan (KWT) yang dibina	5%		5%			5%		
03.	2.	04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per kapita per tahun	Jumlah dokumen target konsumsi pangan yang tersusun	1 dokumen		1 dokumen			1 dokumen		
03.	2.	04	02	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	Jumlah pembinaan kelompok P2L yang dilaksanakan	12 kali		12 kali			12 kali		
05.				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) yang aman	70%		60%			65%		
05.	2.	01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) yang diterbitkan (%)	100%		100%			100%		
05.	2.	01	01	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	Persentase PSAT yang diuji (%)	100%		100%			100%		

05	2.	01	05	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang tersedia (buah	60 buah		60 buah			60 buah		
07.				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah poktan yang naik kelas/score	67,00 %		60,15%			65,72%		
07.	2.	01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan dan petani (unit)	4 unit		4 unit			4 unit		
07.	2	01.	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kompetensi penyuluh dan petani (orang)	56 orang		52 orang			52 orang		
07.	2.	01.	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang naik kelas (kelompok)	4 kelompok		4 kelompok			4 kelompok		
07.	2.	01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah media informasi (buah)	6 buah		5 buah			5 buah		
07	2.	01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Persentase jumlah kelompok tani yang berbadan hukum (kelompok)	3%		2%			2%		

				URUSAN PERTANIAN								
02.				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (padi)	6.943,81 ton		6.671,51 ton			6.807,66 ton	
					Jumlah Populasi ternak (ekor)	2.851.000		2.800.000			2.823.400	
02.	2.	01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Luas lahan yang digarap (ha)	30		30			30	
02.	2.	01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 ha		0,5 ha			0,5 ha	
02.	2.	01.	02	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6		6			6	
02.	2.	02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pemanfaatan SDG tanaman (%)	51		45			45	
02.	2.	02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Persentase Sumber Daya genetik tanaman yang dimanfaatkan penangkar (%)	100		100			100	

02.	2.	03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah kelahiran ternak yang berkualitas (%)	35		25			25		
02.	2.	03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah ternak yang di inseminasi buatan	100 ekor		50 ekor			75 ekor		
02.	2.	05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ternak bantuan yang berproduksi (ekor)	60		50			50		
					Cakupan pengawasan peredaran bibit ternak di wilayah kota (%)	10		5			5		
02.	2.	05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah ternak yang didistribusikan ke masyarakat (ekor)	500 ekor		500 ekor			500 ekor		

03				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase prasarana pertanian yang tersedia	100%		100%			100%		
03.	2.	01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang ditingkatkan	5 %		5%			5%		
					Persentase luas tanam hortikultura yang ditingkatkan	10%		10%			10%		
					Persentase luas tanam perkebunan yang ditingkatkan	0,0009 %		0,0009 %			0,0009 %		
03.	2.	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	8 kali		6 kali			6 kali		
03.	2.	01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah dokumen masterplan yang tersusun	0		0			0		
					Peningkatan kualitas kadar kering karet (K3)	42%		40%			40%		

04				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah hewan yang tertangani	260 ekor		240 ekor			250 ekor		
04.	2.	01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus penyakit zoonosis dan penyakit menular ternak yang tertangani	100%		100%			100%		
04.	2.	01.	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah vaksinasi rabies pada hewan pembawa rabies	550 ekor		450 ekor			500 ekor		
04.	2.	01.	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan/ternak yang di obati	50 ekor		20 ekor			25 ekor		
04.	2.	02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tempat pemotongan hewan yang dibina	10%		10%			10%		
04.	2.	02.	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah sampel produk asal hewan yang diambil	5 sampel		5 sampel			5 sampel		

				URUSAN PERIKANAN								
04.				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	399,55 ton		362,40			380,52	
04.	2.	02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (RTP) yang mendapatkan bantuan fasilitasi usaha dari pemerintah	10 RTP		10 RTP			10 RTP	
04.	2.	02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pokdakan/UPR yang telah menerapkan CPIB, CBIB	5 kelompok		5 kelompok			5 kelompok	

05.				PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	35,05 ton		31,8			33,39		
05.	2.	01		Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	Jumlah sumberdaya perikanan yang dapat diusahakan	1 kawasan		1 kawasan			1 kawasan		
05.	2.	01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	Jumlah pengawasan pelaku usaha perikanan tangkap yang dilaksanakan	12 kali		12 kali			12 kali		
06.				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan	2%		113,15			2%		
06.	2.	02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah produksi usaha poklhasr yang dinyatakan berkualitas dan aman	116,28 ton		112,5 ton			114 ton		

06.	2	02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Poklamsar yang telah melaksanakan pengolahan yang baik berdasarkan CPIB	2 kelompok		1 kelompok			1 kelompok		
06.	2.	03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angka Konsumsi (kg/kapita/tahun)	50,5		50			50		
06.	2.	03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Poklamsar baru	1 kelompok		1 kelompok			1 kelompok		
06.	2.	03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Poklamsar yang mendapatkan fasilitas	2 kelompok		2 kelompok			2 kelompok		

Tabel 2.1.1.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja UPT. Balai Pembibitan Ternak Pusat Kesehatan Hewan (BPTPKH)
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kota Banjarbaru

Kegiatan Tahun 2021 Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2021)		
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Target Realisasi (%)	Target Renja SKPD	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
	Urusan Semua SKPD									
02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Populasi ternak (ekor)	2.851.000 ekor		2.800.000 ekor			2.823.400 ekor		
02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak	Prosentase ternak bantuan yang berproduksi (%)	60		50			50		

				dalam Daerah Kabupaten/Kota								
					Cakupan pengawasan peredaran bibit ternak di wilayah kota (%)	10		5			5	
04				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah hewan yang tertangani	260 ekor		240 ekor			250 ekor	
04.	2.	03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan jasa laboratorium dan medik Veteriner tepat waktu dan tepat syarat	75%	1 tahun	75%			75%	
04.	2.	03.	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah pelayanan penanganan kesehatan hewan (ekor)	28 ekor	1 tahun	25 ekor			25 ekor	
					Jumlah pelayanan jasa laboratorium (sampel)	28 sampel		24 sampel			24 sampel	

Tabel 2.1.1.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja UPT. Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (PPBAT)
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kota Banjarbaru

Kegiatan Tahun 2021 Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2021)		
					Target SKPD	Renja	Realisasi Renja SKPD	Target Realisasi (%)	Target SKPD	Renja
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
	Urusan Semua SKPD									
04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	399,55 ton		362,40			380,52		
04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Benih Calon Induk Unggul dan Produksi Benih Sebar (ekor)	550.000 ekor		500.000 ekor			500.000 ekor		

04.	2.	04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidaya ikan	7 buah		5 buah			5 buah		
-----	----	----	----	------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	--------	--	--------	--	--	--------	--	--

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas

Berikut ini beberapa capaian indikator kinerja pelayanan dinas sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Sasaran Renstra

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target Renstra Tahun 2016-2021					Realisasi Capaian Tahun 2016-2021					Rasio Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Bidang Pangan																
1.	Ketersediaan Pangan Masyarakat (Score PPh Ketersediaan)	score	73,59	80,09	82	84	86	73,59	80,09	81,93	82,68	80,11	100%	100%	99,9%	98,43%	93%
2.	Score PPh Pola Konsumsi	score	Na	Na	91,20	90,20	90,7	Na	Na	89,20	89,9	90,1	Na	Na	97,71%	99,66%	99,33%
3.	Persentase sarana media elektronik dan media cetak yang dapat dijangkau oleh	%	46	66	66	88	88	46	66	66	88	88	100%	100%	100%	100%	100%

	penyuluh pertanian dan masyarakat petani																
4.	Persentase kenaikan kelas BPP	%	25	25	25	50	50	25	25	25	50	50	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Prosentase Kelas Kelompok Tani		Na	Na	34,55	50,91	67,27	Na	Na	34,55	50,91	67,27	Na	Na	100%	100%	100%
6.	Prosentase tenaga penyuluh pertanian PNS yang memiliki sertifikat		Na	Na	25	31,25	37,50	Na	Na	6,25	41	37,50	Na	Na	25%	131,20%	100%
7.	Prosentase tenaga penyuluh pertanian Non PNS yang memiliki sertifikat (STTPL)		Na	Na	38,46	53,85	69,23	Na	Na	63,63	53,85	69,23	Na	Na	165%	100%	100%
8.	Prosentase tenaga penyuluh pertanian yang berkinerja baik		Na	Na	100	100	100	Na	Na	100	100	100	Na	Na	100%	100%	100%
	Bidang Pertanian																
9.	Total Produksi Tanaman Padi Pertahun	ton	5.700	5.950	6.123	6.296	6.649	5.700	6.100	7.184	6.728	7.108	100%	97,54%	112%	106,86%	106,90%
10.	Total Produksi Tanaman Cabe Pertahun	ton	700	710	731	752	773	700	710	941,8	774,7	510	100%	100%	128,84%	103,2%	78,46%
11.	Total Produksi Tanaman Karet Pertahun	ton	900	937	952	967	982	900	937	974,945	974	958,6	100%	100%	102,4%	100,72%	127,93%
12.	Peningkatan Hasil Peternakan	ekor	Na	Na	2.659.793	2.712.413	2.766.840	Na	Na	2.660.399	2.792.257	2.820.347	Na	Na	100,02%	102,94%	101,93%
13.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Zoonosa (kasus)	kasus	Na	Na	60	57	54	Na	Na	86	21	24	Na	Na	143,3%	36,84%	44%
14.	Ternak yang terserang penyakit (ekor)	ekor	Na	Na	110	105	100	Na	Na	272	66	83	Na	Na	247,27%	62,86%	83%
15.	Prosentase Produk Pangan Segar Peternakan	%	Na	Na	4	3	2	Na	Na	1	1	1	Na	Na	25%	33,33%	50%

Bidang Perikanan																	
16.	Produksi Perikanan Budidaya	ton	5.550,65	5.828,18	6.119,59	6.425,57	6.749,85	5.550,65	5.828,18	6.500	6.860	3.120,50	100%	100%	106%	106,76%	46%
17.	Produksi Perikanan Tangkap	ton	57,32	58,47	59,84	60,83	62,05	57,32	58,47	59,84	70	36,2	100%	100%	100%	115,07%	58%
18.	Produksi Hasil Olahan Perikanan	ton	69,8	78	85,8	94,38	103,8	70,46	88,22	350	113,15	158,82	99,06%	88,41%	408%	119,89%	153%

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berikut ini isu isu penting dari perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas :

“Belum Optimalnya Ketersediaan Pangan Masyarakat”.

Penetapan isu tersebut didasarkan kepada beberapa kondisi daerah saat ini, yaitu sebagai berikut :

1. Berkurangnya lahan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan karena tingginya alih fungsi lahan ;
2. Kelompok Tani sebagian besar belum memiliki badan hukum ;
3. Minat masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan semakin berkurang ;
4. Sumber daya aparatur yang belum berkarakter dan berjiwa melayani ;
5. Daya saing produk rendah ;
6. Belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan ;
7. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berikut ini beberapa hal penting dari Rancangan Awal RKPD yang menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja dinas.

a. Prioritas Pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2024

Prioritas pembangunan periode Tahun 2021-2026 adalah memperkuat keterkaitan antara simpul pembangunan sektoral dan simpul pembangunan kewilayahan, dengan arah kebijakan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru :

1. Melaksanakan pengadaan cadangan pangan daerah.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan
3. Penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal.
4. Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita/tahun.
5. Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
6. Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten /Kota.
7. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/Kota.
8. Pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi , serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
9. Pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/Kota.
10. Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan
11. Pengawasan usaha perikanan tangkap di perairan umum.
12. Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.

13. Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengoahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota.
14. Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 daerah Kabupaten Kota.
15. Pengawasan dan pendampgunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi.
16. Pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan tanaman skala kecil.
17. Penjaminan peredaran benih/bbibit ternak
18. Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian.
19. Pembebasan penyakit hewan menular dan zoonosis.
20. Penyediaan pelayanan jasa laboratorium da medik veterinar.
21. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamaytan dan desa.
22. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa
23. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian.

Dalam rangka mengarahkan proses pembangunan Kota Banjarbaru pada tahun 2024, penentuan prioritas pembangunan pada tahun 2024 didasarkan kepada hal-hal berikut :

1. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD yang diterjemahkan kedalam indikator sasaran yang hendak dicapai selama 5 tahun kedepan dari tahun 2021-2026
2. Program prioritas dalam RPJMD tahun 2021 – 2026 sebagai penjabaran sasaran dan pencapaian indikator sasaran yang ingin dicapai.
3. Tema dan kebijakan pembangunan tahun 2023 berdasarkan pada RPJMD tahun 2021 - 2026.
4. Permasalahan mendesak dan isu strategis pada tahun 2024.

Begitu pula dengan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru turut mendukung tercapainya sasaran yang tertuang dalam Renstra SKPD seperti ;

1. Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat ;
2. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan ;
3. Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya ;
4. Peningkatan Sumberdaya Perikanan ;
5. Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan ;
6. Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/Peternakan ;
7. Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian ;
8. Peningkatan Status Kesehatan Hewan di Kota Banjarbaru ;
9. Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan dan Petani.

Adapun Strategi Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru, yaitu ;

1. Peningkatan penyaluran pangan pokok sesuai dengan kebutuhan daerah..
2. Peningkatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangani.
3. Peningkatan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun..
4. Peningkatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.
5. Peningkatan pengelolaan perikanan budidaya.
6. Peningkatan sumberdaya perikanan
7. Peningkatan produksi olahannhasil perikanan.
8. Peningkatan pengembangan sarana pertanian/peternakan
9. Peningkatan populasi ternak.
10. Peningkatan penyediaan prasaran pertanian
11. Peningkatan status kesehatan hewan
12. Peningkatan kelembagaan penyuluhan dan petani

Tabel 2.4
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
 KOTA BANJARBARU**

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	B	9.624.946			Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	B	9.624.946	
			Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100	1.254.955			Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100	1.254.955	
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,25	1.532.450	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	90,25	1.344.565	

Pangan Masyarakat		Konsumsi			Masyarakat					
Pengawasan Keamanan Pangan		Persentase PSAT(Pangan Segar Asal Tumbuhan) yang aman	70	99.455			Persentase PSAT(Pangan Segar Asal Tumbuhan) yang aman	70	99.455	
Pengelolaan Perikanan Budidaya		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	399,55	329.992			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	399,55	329.992	
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	35,05 ton	19.261			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	35,05 ton	19.261	
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Persentase pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan	2 %	178.670			Jumlah Produksi Hasil Olahan	2%	178.670	
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Jumlah produksi tanaman pangan (padi)	6.943,81	666.194			Jumlah produksi tanaman pangan (padi)	6.943,81	666.194	
		Jumlah populasi ternak	2.851.000	1.507.650			Jumlah populasi ternak	2.851.000	1.507.650	
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana		Persentase Prasarana Pertanian yang	100	175.480			Persentase Prasarana Pertanian yang	100	175.480	

	Pertanian		diaplikasikan					diaplikasikan			
	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah hewan yang tertangani	260 ekor	88.954			Jumlah hewan yang tertangani	260 ekor	88.954	
	Penyuluhan Pertanian		Persentase Poktan yang naik kelas/score	67,00	461.485			Persentase Poktan yang naik kelas/scorei	67	461.485	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG kecamatan dan kota serta Forum Gabungan SKPD sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan perikanan Budidaya, terdapat 4 (empat) usulan.
2. Program Penyediaan dan pengembangannya Sarana Pertanian, terdapat 22 usulan.
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, terdapat 3 usulan.

Selain melalui mekanisme Musrenbang Kecamatan dan Kota, usulan program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat bisa juga melalui pokok – pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Banjarbaru.

Tabel 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KOTA BANJARBARU

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	B	
			Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	
2.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	90,35	
3.	Pengawasan Keamanan Pangan		Persentase PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) yang aman	75%	
4.	Pengelolaan Perikanan Budidaya		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	411,62	
5.	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	36,46	
6.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Persentase pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan	10%	
7.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Jumlah Produksi Tanaman Pangan (padi) (ton)	7.224,34	
			Total Populasi Ternak (ekor)	2.8905.400	
8.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Persentase Prasarana Pertanian yang diaplikasikan	100	
9.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah hewan yang tertangani (ekor)	290	
10.	Penyuluhan Pertanian		Persentase poktan yang naik kelas/score	69,0 %	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

a. Arah Kebijakan Nasional Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Ketahanan Pangan

Arah kebijakan bidang Ketahanan Pangan adalah peningkatan kedaulatan pangan yang dicerminkan pada kekuatan mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan ;

- a. Ketahanan Pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri
- b. Pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri ; dan
- c. Mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani/kelompok tani dan nelayan

Perikanan

Arah kebijakan umum Nasional bidang Perikanan sebagai berikut :

1. Memperkuat kelembagaan dan sumberdaya manusia secara terintegrasi.
2. Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan.
4. Memperluas akses pasar domestik dan internasional.

Pertanian

Arah kebijakan umum Nasional bidang Pertanian adalah Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal, meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan,

menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Di bidang Perkebunan adalah pengembangan komoditas perkebunan strategis, pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perkebunan, pengembangan sumber daya insani (SDI) perkebunan, penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha perkebunan.

Peternakan

Arah Kebijakan di bidang Peternakan adalah stabilitasi pasokan dan harga daging. Kebijakan ini didasari kebutuhan daging sapi dalam negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan harga daging di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN, sehingga presiden harus menetapkan langkah dalam mengendalikan dan menstabilkan harga. Langkah –langkah dalam meningkatkan produksi daging sapi dalam negeri ;

- Upaya peningkatan populasi
- Pengembangan logistik dan distribusi
- Perbaikan tata niaga sapi dan daging sapi
- Penguatan kelembagaan melalui sentra peternakan rakyat (SPR)

b. Prioritas Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan

Ketahanan Pangan

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
2. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Perikanan

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
2. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pertanian dan Peternakan

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
4. Program Penyuluhan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan :

Tujuan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru adalah :

“Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat”.

Sasaran :

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru adalah :

1. Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat ;
2. Pengawasan Keamanan Pangan ;
3. Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya ;
4. Peningkatan Sumberdaya Perikanan ;
5. Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan ;
6. Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/Peternakan ;
7. Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian ;
8. Peningkatan Status Kesehatan Hewan di Kota Banjarbaru ;
9. Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan dan Petani.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan dinas tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- Pencapaian Visi Kepala Daerah, yaitu Terwujudnya Banjarbaru Maju, Agamis, dan Sejahtera, dan Misi 2 dari Kepala Daerah, yaitu Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan lokal dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup yang diterjemahkan kedalam sasaran RPJMD 2021- 2026. Selain itu juga untuk mendukung Program Juara Kepala Daerah yang terkait dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru yaitu “PROGRAM JUARA URBAN FARMING” dalam rangka mengembangkan Pertanian, Perikanan, Peternakan dan penyediaan Bantuan Bibit Unggul, Pupuk serta alat dan mesin Pertanian.

Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan adalah 10 (sepuluh) program, terdiri 1 (satu) program urusan semua SKPD, 2 (dua) program Urusan Wajib, dan 7 (tujuh) program Urusan Pilihan, dengan total kegiatan 24 (dua puluh empat) kegiatan dan total sub Kegiatan 51 (lima puluh satu) sub kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif yg direncanakan untuk menjalankan keseluruhan program adalah Rp 26.227.254.593,- (dua puluh enam milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang bersumber dari dana APBD dan DAK Kota Banjarbaru. Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut ;

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Banjarbaru

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegia tan				Tolok Ukur	Target		
		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN							24.573.955.2 40,00				20.689.021.553, 00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.771.058.8 40,00				14.677.839.253, 00		
2	0 9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							15.771.058.8 40,00				14.677.839.253, 00		
2	0 9 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							14.772.982.3 40,00				13.420.423.253, 00		
2	0 9 1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							352.635.750, 00				56.396.000,00	
2	0 9 1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
				Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB indeks	2 Dokumen	100 %	25.635.750,0 0	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	2 Dokum en	30.636.000,00
2	0 9 1	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

						Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB indeks	3 Laporan	100 %	327.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	25.760.000,00
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								12.490.496.140,00					11.709.377.253,00
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
					Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB indeks	98 Orang/bulan	100 %	12.441.936.140,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/bulan	11.657.017.253,00	
2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													

					Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB indeks	1 Laporan	100 %	23.560.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	24.860.000,00	
2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
					Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB indeks	1 Laporan	100 %	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	27.500.000,00	
2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							30.868.000,00					33.868.000,00	
2	09	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													

						Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase laporan barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB indeks	1 Laporan	100 %	30.868.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	33.868.000,00						
2	09	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah							851.516.500,00							472.306.000,00				
2	09	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
						Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB indeks	3 Paket	100 %	28.911.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	31.806.000,00						
2	09	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
						Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB indeks	6 Paket	100 %	220.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	242.000.000,00						
2	09	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
						Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB indeks	3 Paket	100 %	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	22.000.000,00						

2	0	0	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
					Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB indeks	1 Dokumen	100 %	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.600.000,00
2	0	0	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB indeks	1 Laporan	100 %	576.605.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	169.900.000,00
2	0	0	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								155.149.000,00				55.000.000,00
2	0	0	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB indeks	10 Unit	100 %	155.149.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	55.000.000,00
2	0	0	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								620.108.300,00				706.041.000,00
2	0	0	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	100 %	338.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	1 Laporan	405.200.000,00

2	0	0	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal													
					Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Peningkatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90,35 scoring	1 Laporan	1.792 Kkal/Kapita/hari	478.718.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	573.344.300,00	
2	0	0			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								173.382.150,00					230.652.500,00
2	0	0	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota								173.382.150,00					230.652.500,00
2	0	0	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota													
					Cakupan pengawasan keamanan pangan segar yang beredar di kota (%)	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Keamanan Pangan Melalui Pengujian PSAT	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	1 Dokumen	100 %	19.999.850,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	22.000.000,00	
2	0	0	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota													
					Cakupan pengawasan keamanan pangan segar yang beredar di kota (%)	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Peningkatan Keamanan Pangan Melalui Pengujian PSAT	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	1 Dokumen	100 %	153.382.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah	1 Dokumen	208.652.500,00	

3	2	0			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				50.000.000,0						55.000.000,00	
3	2	0	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				50.000.000,0						55.000.000,00	
3	2	0	2.01	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota											
					Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Peningkatan Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36,46 Ton	1 Dokumen	100 %	50.000.000,0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	55.000.000,00
3	2	0			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				193.605.900,00						260.345.000,00	
3	2	0	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				31.199.850,0						33.000.000,00	
3	2	0	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil											

						Persentase pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Peningkatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 %	7 Unit Usaha	100 %	31.199.850,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	7 Unit Usaha	33.000.000,00	
3	2	0	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								162.406.050,00					227.345.000,00	
3	2	0	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
						Persentase pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 %	140.8 Ton	10 pelaku	54.999.750,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	140.8 Ton	60.000.000,00	

3	2	0	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
					Persentase pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Peningkatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 %	2 Pelaku Usaha	10 pelaku	107.406.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2 Pelaku Usaha	167.345.000,00
3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						6.746.300.100,00					5.305.616.900,00	
3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						4.617.503.500,00						2.909.238.000,00
3	2	0	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						2.520.297.500,00						1.394.600.000,00
3	2	0	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian												
					Jumlah Produksi Tanaman Pangan (padi)	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Peningkatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7224,34 ton	1 Laporan	0,5 %	1.836.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	696.900.000,00
3	2	0	2.01	0009	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang												
					Jumlah Produksi Tanaman Pangan (padi)	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Peningkatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7224,34 ton	500 Batang	0,5 %	154.060.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	500 Batang	159.700.000,00

3	2	0	2.01	0012	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan											
					Jumlah Produksi Tanaman Pangan (padi)	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Peningkatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7224,34 ton	1 Laporan	0,5 %	279.337.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	1 Laporan	288.000.000,00
3	2	0	2.01	0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura											
					Jumlah Produksi Tanaman Pangan (padi)	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Peningkatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7224,34 ton	1 Laporan	0,5 %	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	1 Laporan	250.000.000,00
3	2	0	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						2.097.206,00					1.514.638.000,00
3	2	0	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain											
					Jumlah Populasi Ternak	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Peningkatan Pengembangan Ternak	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2905400 Ekor	500 Ekor	500 ekor	2.097.206,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	500 Ekor	1.514.638.000,00
3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						797.399.900,00					849.999.900,00
3	2	0	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian						797.399.900,00					849.999.900,00
3	2	0	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian											

					Persentase Cakupan Prasarana Pertanian yang disediakan (%) Persentase Prasarana Pertanian yang diaplikasikan	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Peningkatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	35 Ha	5 %	422.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	35 Ha	475.000.000,00
3	2	0	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota												
					Persentase Cakupan Prasarana Pertanian yang disediakan (%) Persentase Prasarana Pertanian yang diaplikasikan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Peningkatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Dokumen	5 %	374.999.900,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	374.999.900,00
3	2	0			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							296.284.000,00					483.084.000,00
3	2	0	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota							233.384.000,00					415.384.000,00
3	2	0	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular												
					Jumlah hewan yang tertangani	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Peningkatan Pelayanan Penyakit Zoonosis dan Penyakit Menular Ternak	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	290 ekor	4 Laporan	100 %	188.954.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	4 Laporan	366.954.000,00

3	2	0	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												
					Jumlah hewan yang tertangani	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Peningkatan Pelayanan Penyakit Zoonosis dan Penyakit Menular Ternak	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	290 ekor	4 Laporan	100 %	44.430.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4 Laporan	48.430.000,00	
3	2	0	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota								62.900.000,00				67.700.000,00
3	2	0	2.02	0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya												
					Jumlah hewan yang tertangani	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Peningkatan Pembinaan Tempat Pemotongan (Tempat Pemotongan Hewan dan Tempat Pemotongan Unggas)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	290 ekor	4 Laporan	100 %	62.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	4 Laporan	67.700.000,00	
3	2	0			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								1.035.112.700,00				1.063.295.000,00
3	2	0	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian								1.035.112.700,00				1.063.295.000,00

3	2	0	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
	7	7				Prosentase Jumlah Poktan yang Naik/Score	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kompetensi Penyuluh dan Petani	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69 %	5 Unit	5 unit	242.926.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	253.540.000,00	
3	2	0	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
	7	7				Prosentase Jumlah Poktan yang Naik/Score	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kompetensi Penyuluh dan Petani	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69 %	4 Unit	5 unit	331.351.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Unit	364.760.000,00	
3	2	0	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
	7	7				Prosentase Jumlah Poktan yang Naik/Score	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kompetensi Penyuluh dan Petani	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69 %	10 Unit	5 unit	383.335.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	10 Unit	334.995.000,00	
3	2	0	2.01	0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani														
	7	7				Prosentase Jumlah Poktan yang Naik/Score	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Peningkatan Kompetensi Penyuluh dan Petani	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua	69 %	5 Unit	5 unit	77.499.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	5 Unit	110.000.000,00	

3	2	0	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					541.817.500,00					627.295.650,00	
3	2	0	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
					Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	412 ton	10 Unit	412 Ton	541.817.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	627.295.650,00
TOTAL											25.550.172.490,00				21.784.717.203,00	

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Nama Perangkat Daerah : UPT. Balai Pembibitan Ternak Pusat Kesehatan Hewan (BTPKH) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		UPT BALAI PEMBIBITAN TERNAK DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN							434.399.750,00					468.400.000,00
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							434.399.750,00					468.400.000,00
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							434.399.750,00					468.400.000,00
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							408.399.750,00				440.000.000,00

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Banjarbaru Tahun 2024 yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2024 merupakan acuan dan sebagai pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dalam penyelenggaraan urusan tata pemerintahan pada bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan selama satu tahun, sehingga pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan dapat berjalan dengan baik dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai serta dapat dipertanggungjawabkan melalui akuntabilitas publik sesuai dengan semangat (Good Governance) untuk menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Renja ini diharapkan agar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.